

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan Ruang
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014–2034.
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038.
12. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
13. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

14. Perwali Surabaya No. 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya
15. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya No. 73 th. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Suarabaya.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
18. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

**Buku:**

1. Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 119
2. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2006.
3. Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 64
4. Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
5. Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008.
6. Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana. 2017
7. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta: FH UII Press, 2011.
8. Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 2001.
9. Purwanto, A. *Manajemen Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
10. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
11. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
12. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
13. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
14. Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011. hal 111
15. Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2013.

16. Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara dan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*. Ed. Revisi. Jakarta. 2016. Hal. 239-241

**Jurnal & Artikel Akademik:**

1. Diah Ariani Arimbi, “Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2020.
2. Sitorus, O. *Hak Atas Tanah dan Pembatasannya dalam Penataan Ruang*. Bandung: Refika Aditama. 2021. hal. 201
3. Yusuf Maulana, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Terdampak Kebijakan Tata Ruang,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021.

**Media Elektronik:**

1. Pemerintah Kota Surabaya. *Pemkot Surabaya Telah Bayar Ganti Rugi Warga Terdampak Flyover Taman Pelangi*. Laporan daring melalui situs resmi Pemerintah Kota Surabaya, <https://www.surabaya.go.id/id/berita/24583/pemkot-surabaya-telah-bayar-ganti-rugi-warga-terdampak>, 2025. Diakses 13 Januari 2026.
2. Pemerintah Kota Surabaya. “Pemkot Surabaya Telah Bayar Ganti Rugi Warga Terdampak Flyover Taman Pelangi, Sebagian Konsinyasi di Pengadilan.” Berita Resmi Pemerintah Kota Surabaya, 13 Desember 2025. Diakses 13 Januari 2026